

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah untuk oleh kemanusiaan yang bersangkutan. Kemiskinan itu juga sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup yang minimum, yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang minimum ini secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Salah satu penghambat pembangunan ekonomi adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan tolak ukur bagi sebuah Negara yang sedang berkembang, apakah pembangunan yang tengah berlangsung dapat dinikmati oleh segenap warga Negeranya tanpa memandang hal-hal yang bersifat atributif. Dengan kata lain, pembangunan yang berlangsung benar-benar merata dalam masyarakat. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan pembangunan utama di Negara yang Sedang Berkembang.

Adapun kendala yang dihadapi Negara yang Sedang Berkembang di dalam mencapai tujuan ini adalah kurang meratanya fokus wilayah pembangunan. Pembangunan selama ini terfokus di wilayah kota sehingga masyarakat desa menjadi kaum yang termajinalkan. Tidak hanya itu saja, masyarakat desa juga memiliki akses terbatas terhadap pemanfaatan program pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah terlebih lagi dengan buruknya infrastruktur, sarana prasarana yang ada di desa. Akses pemanfaatan program justru lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kota yang lebih siap menerima pembangunan.

Dengan demikian, masyarakat desa kurang dapat merasakan manfaat dari informasi teknologi, sumber modal, dan informasi pasar. Tidak meratanya pembangunan dan pendapatan memicu terjadinya pengangguran terbuka dan pengangguran partisipasi angkatan kerja. Pengangguran juga merupakan salah satu faktor terciptanya kemiskinan.

Kemiskinan itu sendiri dapat dilihat dari kondisi tingginya pengangguran, banyaknya pengemis di jalanan maupun yang berkeliaran di kampung-kampung sebagai salah satu indikatornya. Belum lagi anak putus sekolah yang selalu meningkat jumlahnya dari tahun ketahun. Semakin melengkapi data penyandang masalah sosial berpangkal pada kemiskinan. Seperti halnya anak-anak yang masih dibawah umur sudah menjadi pengemis. Kemiskinan dapat dikurangi melalui program pembangunan yang berkelanjutan, oleh karena itu pengurangan

penduduk miskin telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental sehingga menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas berbagai jenis program pembangunan.

Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya memberdayakan masyarakat miskin untuk mandiri, baik dalam ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pemberdayaan ekonomi lapisan masyarakat miskin merupakan suatu yang tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi bagi lapisan masyarakat miskin merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakan apabila pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dikehendaki. Lapisan masyarakat miskin pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi ekonomi, tetapi karena berbagai hal usaha kelompok ini terpendam dalam struktur ekonomi. Oleh karena itu, agar dapat lari dari masalah kemiskinan maka pemberdayaan sosial ekonomi sangat diperlukan sebagai masyarakat miskin mampu bersuara dalam struktur sosial ekonomi tersebut. Semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki oleh lapisan masyarakat miskin, maka semakin tinggi pula akses ekonomi yang dimiliki, yang pada akhirnya dapat mengentaskan dirinya masalah kemiskinan yang dihadapi.

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Gorontalo terutama di Provinsi Gorontalo yakni masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian

pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya di Kota Gorontalo. Kemiskinan pula merupakan salah satu tolak ukur sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah disuatu daerah.

Jumlah penduduk miskin Provinsi Gorontalo berbeda, yang menjadi sorotan adalah jumlah penduduk miskin Provinsi Gorontalo terutama di Kabupaten Gorontalo yang cukup tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Padahal setiap Provinsi memiliki akses dan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Kemiskinan di Kabupaten juga berbeda, berikut data yang menunjukkan jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo**  
**Tahun 2017**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (kk)
1.	Kab. Boalemo	158.333	21.85
2.	Kab. Gorontalo	374.923	20.55
3.	Kab. Pohuwato	153.991	21.27
4.	Kab. Bone Bolango	157.186	17.81
5.	Kab. Gorontalo Utara	112.975	19.23
6.	Kota Gorontalo	206.454	5.70
7.	Provinsi Gorontalo	1.150.765	17.65

**Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018**

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo rendahnya pendapatan penduduk menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin provinsi gorontalo sebesar 1.168.190 juta jiwa. pada tahun 2017 penduduk miskin terbanyak di kota gorontalo sebanyak 206.454 juta jiwa (5.50%). Sementara itu di kabupaten gorontalo utara dan

kabupaten bone bolango walaupun relatif sedikit yaitu 112.975 juta orang dan 157.186 juta orang, namun relatif lebih tinggi dibanding kota gorontalo yaitu 19.23 persen dan 17.81 persen. Perkembangan jumlah dan persentase angka kemiskinan di provinsi gorontalo relatif berbeda.

Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Berikut ini dijelaskan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran partisipasi angkatan kerja yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Gorontalo sebagaimana terdapat di Tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka /Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Tahun 2008-2017**

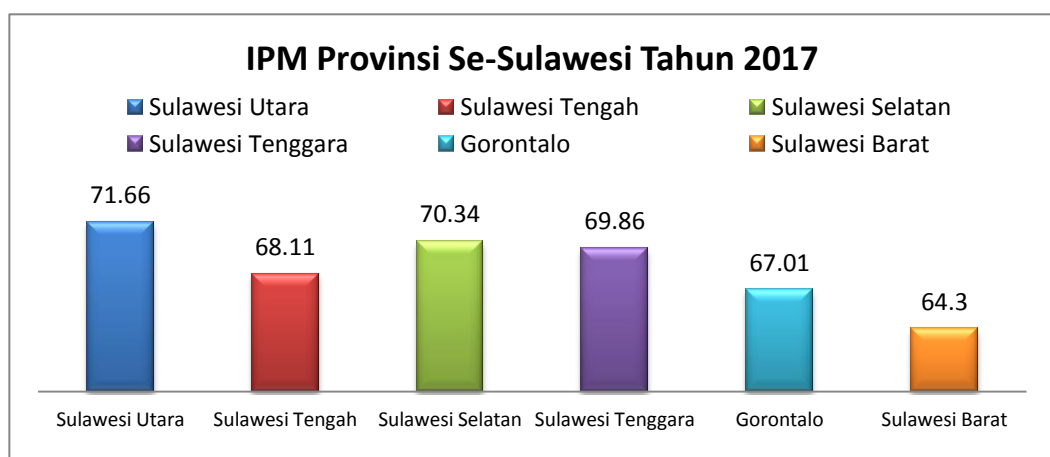
No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
1	2008	5.65	62.40
2	2009	5.89	63.77
3	2010	5.16	64.42
4	2011	6.68	64.03
5	2012	4.44	62.59
6	2013	4.15	61.46
7	2014	4.18	62.84
8	2015	4.65	63.65
9	2016	2.76	67.89
10	2017	4.28	64.78

**Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2018**

Berdasarkan Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo pada tahun 2008 memiliki 5,65% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2009 5.89% setelah itu turun lagi pada tahun 2010 5.16% dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 6.68% pada

tahun 2012 memiliki 4,44% kemudian mengalami penurunan tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu 4,15% dan 4,18% . pada tahun 2015 naik lagi menjadi 4,65% dan kembali turun pada tahun 2016 dan 2017 yaitu 2,76% dan 4,28% sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2016 meningkat 67,89% dan terendah pada tahun 2013.

Salah satu sumber yang menyebabkan pengaruh jumlah penduduk miskin salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Karena itu diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula jika nilai IPM tinggi, maka tingkat kemiskinan rendah. Untuk mengetahui lebih jelasnya tingkat IPM di Provinsi Se-Sulawesi dapat dilihat dalam Grafik 1.3



Sumber Data, Badan Pusat Statistik 2018

Grafik 1.3 Perbandingan Tingkat IPM Se-Sulawesi

Berdasarkan Grafik 1.3 perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat dengan angka yang bervariasi antar Provinsi Se-Sulawesi. Pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertinggi di miliki Sulawesi utara sebesar 71,66% sedangkan yang masih terlihat rendah di miliki Sulawesi Barat yaitu 64,3% . Dan untuk IPM terendah kedua di miliki oleh Provinsi Gorontalo. Nilai IPM tinggi idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Sehubungan dengan uraian diatas, menunjukkan bahwa penelitian tentang **“Pengaruh Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan”** sangat penting untuk dilakukan dalam pengembangan ekonomi makro pada masa yang akan datang.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih tinggi.
2. Tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo masih tinggi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian yang dijawab melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama tahun 2008-2017
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama tahun 2008-2017.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada masalah penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama tahun 2008-2017
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama tahun 2008-2017

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

➤ **Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian adalah hasil penelitian diharapkan dapat sebagai pengembangan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan dalam sektor perpajakan. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

➤ **Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Provinsi Gorontalo (Pengaruh pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan).